

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN

Dara Diana<sup>1</sup>

Ikhyanuddin<sup>2</sup>, Murhaban<sup>3</sup>, Mursidah<sup>4</sup>

[dara.200420249@mhs.unimal.ac.id](mailto:dara.200420249@mhs.unimal.ac.id)<sup>1</sup>, [ikhyanuddin@unimal.ac.id](mailto:ikhyanuddin@unimal.ac.id)<sup>2</sup>, [murhaban@unimal.ac.id](mailto:murhaban@unimal.ac.id)<sup>3</sup>,  
[mursidah@unimal.ac.id](mailto:mursidah@unimal.ac.id)<sup>4</sup>

*Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe  
Kampus Bukit Indah Blang Pulo, Kec. Muara Satu-Lhoukseumawe*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan variabel independen dalam penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang berada di kabupaten/Kota Bireuen sebanyak 35 SKPD. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dan diperoleh sebanyak 105 responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer. Terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini di antaranya adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), uji regresi data regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Kapasitas SDM, Penerapan SAP, SPI Dan Pengawasan Keuangan Pemda**

### Abstract

*This research aims to examine the influence of human resource capacity, the implementation of government accounting standards, internal control systems, and local government financial supervision on the quality of local government financial statements. The dependent variable in this study is the quality of local government financial statements, while the independent variables are human resource capacity, the implementation of government accounting standards, internal control systems, and local government financial supervision. The population for this study includes all SKPD (Regional Work Units) in Bireuen Regency/City, totaling 35 SKPD. The sampling method used in this research is purposive sampling, which involves selecting samples based on specific criteria, resulting in 105 respondents. This study is quantitative and utilizes primary data sources. Several research methods are employed to achieve the research objectives, including data quality tests, classical assumption tests (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test), and multiple linear regression analysis. The results indicate that human resource capacity, the implementation of government accounting standards, internal control systems, and local government financial supervision have a significant positive effect on the quality of local government financial statements.*

**Keywords: Quality of Regional Government Financial Reports, Human Resource Capacity, Implementation of SAP, SPI and Local government financial supervision**

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah. Jika laporan keuangan ini mempengaruhi pengambilan keputusan maka dianggap laporan yang berkualitas (Jatmiko *et al.*, 2020). Oleh karena itu, organisasi sektor mempunyai peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan (Yusriwati, 2022).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksaan dan Pemeriksaan (BPK) dalam bentuk opini. Pendapat Badan Pemeriksaan Keuangan tersebut diberikan sesuai dengan Peraturan Lembaga Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan pendapatnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya. Pendapat tersebut dibuat berdasarkan empat kriteria, antara lain efisiensi sistem pengendalian internal (SPI), kepatuhan hukum. Kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Mahardini, 2018).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dalam penelitian ini, faktor pertama adalah kemampuan sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk dapat menulis laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki banyak pengalaman di bidang akuntansi keuangan, memiliki pemahaman yang mendalam tentang akuntansi keuangan, dan dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif (Jatmiko *et al.* 2020).

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan daerah yang memadai dan berkualitas disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Standar akuntansi dan sistem akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan pelaporan dan akuntabilitas keuangan disajikan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas (Putri *et al.* 2019).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah sistem pengendalian internal. Kualitas laporan keuangan suatu pemerintah daerah ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal instansi terkait. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai dan terarah sehingga dapat mempengaruhi produksi laporan keuangan yang berkualitas untuk dipublikasikan (Yusriwati, 2022).

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah adalah pengawasan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan pemerintah daerah sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Adanya pengawasan terwujudnya suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penetapan atau evaluasi tentang sejauh mana pelaksanaan kerja dilakukan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, serta sejauh mana tindakan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut (Iqbal *et al.* 2022).

Fenomena yang terjadi terkait kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, terdapat banyak kasus buruknya kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang masih menjadi permasalahan yang perlu diselidiki dengan baik. Dalam hal ini, banyak kendala menyangkut penyajian informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah kabupaten bireuen secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, kelemahan pengelolaan keuangan yang material pada akun aset tetap, pengelolaan kas, pencatatan piutang, penatausahaan

persediaan, penyajian saldo investasi permanen dan non permanen, pengakuan terhadap aset lainnya, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pada sektor pemerintahan kabupaten Bireuen, permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia adalah Pelaksana Pengelola Keuangan (PPK) dan penyusunan laporan keuangan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan disebagian instansi masih kurang pemahaman dan pengetahuannya dibidang akuntansi, alokasi sumber daya manusia yang tidak tepat, tingkat pemahaman dasar staf keuangan mengenai administrasi keuangan daerah masih lemah serta penghargaan yang belum memadai (Nilawati *et al.* 2021).

Lebih lanjut, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kekurangan pada sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap standar perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah Bireuen pada tahun anggaran 2022 yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disusun yaitu Pendataan dan penetapan wajib pajak daerah atas pajak restoran belum sepenuhnya memadai sehingga potensi PAD tidak dapat digali secara optimal. Kekurangan volume atas 19 paket kegiatan belanja modal pada empat SKPK sebesar Rp 1.354.510.344,38 dan denda keterlambatan satu paket pekerjaan pada Dinas PK sebesar Rp 1.056.749,94 sehingga terjadi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1.354.510.344,38 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan Rp 1.056.749,94. Data piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sehingga penyajian saldo piutang PBB P2 belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Masalah lain dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya berdasarkan penelitian Binawati (2022) bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut temuan Yanti (2020), penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Yanti (2020), Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berbeda dengan penelitian Mahatini (2021), hasil penerapan standar akuntansi pemerintahan ternyata tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern pun tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Bestari (2023) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian Desipradani (2018) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Teori *Stewardship***

*Grand theory* yang mendasari penelitian ini merupakan bagian dari teori keagenan yang dikenal dengan teori *stewardship*. Menurut Donaldson & Davis (1991), teori *stewardship* menjelaskan bahwa lingkungan dan keadaan menyebabkan manajemen lebih fokus pada kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan individu. Anggapan ini didasari oleh sifat individu untuk bersikap hormat, amanah, ikhlas, dan jujur terhadap orang lain.

Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini adalah dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai lembaga yang mampu menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan mempercayakan tanggung jawab keuangan. Hal ini akan membantu mencapai tujuan perekonomian dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal.

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut (1) andal, (2) relevan, (3) dapat dipahami, dan (4) dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

### **Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Kapasitas sumber daya manusia merupakan keahlian seseorang atau individu dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hartono, 2020). Menurut Tjiptoherijanto dalam (Rioni & Saraswati, 2019) "Penilaian terhadap kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari tingkat tanggung jawab dan kompetensi sumber daya tersebut." Tanggung jawab terlihat atau disertakan dalam deskripsi pekerjaan. Suatu pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa uraian pekerjaan yang jelas. (Ridzal *et al.* 2022).

### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintah adalah aturan akuntansi yang mengimplementasikan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintah tersebut dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Standar Akuntansi Pemerintah yang pertama diterapkan adalah Standar Akuntansi Pemerintah dengan basis Cash Toward Accrual (CTA) atau basis kas ke akrual, ditetapkan melalui PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP (berbasis CTA). Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, sebagaimana dimuat di dalam Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010, diterapkan selambat-lambatnya mulai tahun anggaran 2015, sehingga di dalam masa transisi sebelum memasuki tahun anggaran 2015, pemerintah pusat/daerah dapat menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Cash Toward Accrual (CTA), sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010.

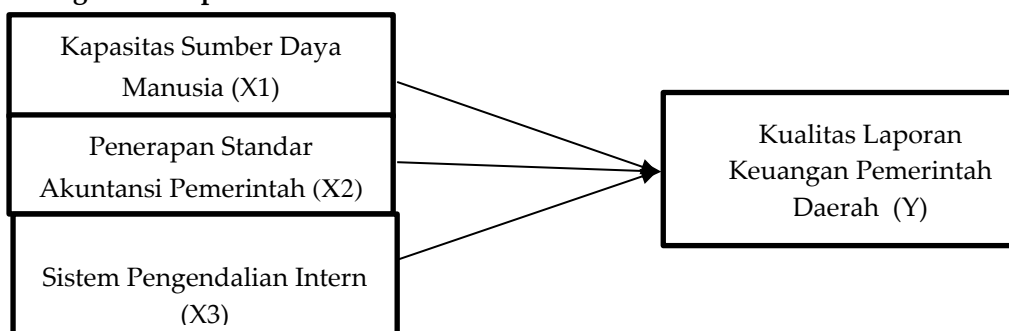
### Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai suatu kesatuan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh manajemen dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui cara yang efektif dan efisien. aktivitas didefinisikan sebagai suatu proses, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

### Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan diatur dalam PP No.17 (1) Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengawasan pemerintah adalah penetapan standar kinerja dalam perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menentukan apakah telah terjadi penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber data organisasi atau pemerintah digunakan seefisien dan seefektif mungkin guna mencapai tujuan organisasi ataupun pemerintah (Dewi & Rini, 2018).

### Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## METODE

### Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Bireuen. Dimana data diambil dari keuesioner yang disebar. Objek dalam penelitian ini adalah Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan populasi seluruh SKPD yang berada yang berada di Kabupaten/kota Bireuen sebanyak 35 SKPD.

Menurut Sugiyono (2017) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pertimbangan sampel dengan pertimbangan kriteria- kriteria tertentu. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel ialah kepala sub-bagian keuangan, Bendahara bagian keuangan dan satu staf yang bekerja di bidang keuangan di SKPD Bireuen.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai pada penelitian ini merupakan data primer. Dimana data primer merupakan data yang didapat secara langsung melalui suatu objek penelitian atau responden, baik secara individu ataupun kelompok (Sugiyono, 2017). Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui penyebaran kuesioner dengan memberikan daftar pertanyaan yang selanjutnya diisi oleh responden yang telah ditentukan.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017).

### Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Sumber
1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Relevan 2. Handal 3. Dapat Dibandingkan Dapat dipahami	Tawaqal & Suparno (2017)
2	Kapasitas Sumber Daya Manusia	1. Pengetahuan 2. Keahlian 3. Sikap	Mulia (2019)
3	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	1. Penyajian Laporan Keuangan 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan 5. Laporan Operasional	Puspitasari (2023)
4	Sistem Pengendalian Intern	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Aktivitas Pengendalian Pengendali 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan	Tawaqal & Suparno (2017)

No	Variabel	Indikator	Sumber
5	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN</li> <li>2. Evaluasi kegiatan</li> <li>3. Pencatatan transaksi dan dokumentasi berdasarkan bukti</li> <li>4. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas</li> <li>5. Laporan OPD sesuai standar akuntansi pemerintahan</li> </ol>	Puspitasari (2023)

### Teknik Analisis Data

Metode analisis menggunakan software SPSS, dalam penelitian ini adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reabilitas, lalu uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Tingkat signifikansi 5% jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka pernyataan tersebut valid. Sedangkan jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka pernyataan tersebut tidak valid. Berikut ini adalah hasil uji validitas:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Y1	0.746	0.205	Valid
	Y2	0.690	0.205	Valid
	Y3	0.821	0.205	Valid
	Y4	0.723	0.205	Valid
	Y5	0.675	0.205	Valid
Kapabilitas Sumber Daya Manusia (X1)	X1.1	0.780	0.205	Valid
	X1.2	0.790	0.205	Valid
	X1.3	0.780	0.205	Valid
	X1.4	0.653	0.205	Valid
	X1.5	0.748	0.205	Valid
Penerapan Standar Akuntansi (X2)	X2.1	0.761	0.205	Valid
	X2.2	0.713	0.205	Valid
	X2.3	0.803	0.205	Valid



Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
	X2.4	0.798	0.205	Valid
	X2.5	0.683	0.205	Valid
Sistem Pengendalian Intern (X3)	X3.1	0.613	0.205	Valid
	X3.2	0.825	0.205	Valid
	X3.3	0.744	0.205	Valid
	X3.4	0.796	0.205	Valid
	X3.5	0.610	0.205	Valid
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (X4)	X4.1	0.726	0.205	Valid
	X4.2	0.751	0.205	Valid
	X4.3	0.816	0.205	Valid
	X4.4	0.659	0.205	Valid
	X4.5	0.829	0.205	Valid

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji validitas dengan jumlah 90 responden dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan variabel yang diajukan untuk responden adalah valid karena dilihat dari nilai r hitung > r tabel (0,205) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

### Uji Reabilitas

Hal yang dilakukan setelah menunjukkan bahwa semua variabel pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji reabilitas sebanyak 94 responden, Pernyataan dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,6. Berikut ini adalah hasil uji reliabel.

**Tabel 2**  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,780	5	Reliabel
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,803	5	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi (X2)	0,802	5	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,768	5	Reliabel
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (X4)	0,810	5	Reliabel

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai Cronbach Alpha diatas 0,60 sehingga dapat disimpulkan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel (dapat diandalkan) sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

### Uji Asumsi Klasik



### Uji Normalitas

Pada penelitian ini, untuk mengetahui normalitas data dengan menggunakan uji statistik. uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan uji *kolmogorow-smirnow*, dengan kriteria yaitu jika nilai signifikansi atau probabilitasnya > dari 0,005 maka distribusi data adalah normal, sedangkan jika nilai signifikansi atau probabilitasnya < dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal.

**Tabel 3**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,30062866
Most Extreme Differences	Absolute	,107
	Positive	,107
	Negative	-,057
Kolmogorov-Smirnov Z		1,039
Asymp. Sig. (2-tailed)		,231

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui nilai *asymp.sig* sebesar 0,231 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.

**Tabel 4. Uji heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	batas	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,472	> 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
Penerapan Standar Akuntansi (X2)	0,500	> 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,131	> 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (X4)	0,772	> 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2024)

Dari gambar 4 dapat dijelaskan bahwa titik-titik bersifat random dan tidak berbentuk pola tertentu, dan dapat dilihat bahwa data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 maka dikatakan penelitian ini terbatas dari gejala heteroskedastisitas.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation Factor (VIF) dan tolerance ( $\alpha$ ).

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	0.891	1.122	Tidak terjadi multikolinieritas
Penerapan Standar Akuntansi (X2)	0.455	2.199	Tidak terjadi multikolinieritas
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0.959	1.043	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (X4)	0.439	2.278	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi dimana hasil perhitungan nilai diketahui bahwa nilai tolerance value  $> 0,10$  atau nilai VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Hasil analisis linear berganda dengan menggunakan software SPSS diperoleh data sebagai berikut.

**Tabel 6.  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

	B	t hitung	t tabel	Sig	Keterangan
(Constant)	1,440	0,671	1,98	0,504	
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,119	1,730		0,087	tidak signifikan
Penerapan Standar Akuntansi (X2)	0,356	3,651		0,000	Signifikan
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,174	2,714		0,008	Signifikan
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (X4)	0,288	2,660		0,009	Signifikan
F hitung	26,913				
Sig F	0.000				

	B	t hitung	t tabel	Sig	Keterangan
Adjusted R Square	0,527				

Berdasarkan tabel 6 diatas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 1,440 + 0,119X_1 + 0,356X_2 + 0,174X_3 + 0,288X_4 + e$$

1. Konstanta = 1,440

Artinya jika tidak ada variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (X<sub>1</sub>), Penerapan Standar Akuntansi (X<sub>2</sub>), Sistem Pengendalian Intern (X<sub>3</sub>) dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (X<sub>4</sub>) yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 1,440 satuan.

2. b<sub>1</sub> = 0,119

Artinya jika variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (X<sub>1</sub>) meningkat sebesar satu satuan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,119 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

3. b<sub>2</sub> = 0,356

Artinya jika variabel Penerapan Standar Akuntansi (X<sub>2</sub>) meningkat sebesar satu satuan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,356 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

4. b<sub>3</sub> = 0,174

Artinya jika variabel Sistem Pengendalian Intern (X<sub>3</sub>) meningkat sebesar satu satuan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,174 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

5. b<sub>4</sub> = 0,288

Artinya jika variabel Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (X<sub>4</sub>) meningkat sebesar satu satuan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,288 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

### Pengujian Hipotesis

Uji t (parsial) dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.

1. Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan H<sub>2</sub> diterima, yang berarti bahwa "Penerapan Standar Akuntansi (X<sub>2</sub>) berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)".
2. Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,008 < 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan H<sub>3</sub> diterima, yang berarti bahwa "Sistem Pengendalian Intern (X<sub>3</sub>) berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)".

3. Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar  $0,009 < 0,05$ . Nilai tersebut dapat membuktikan  $H_4$  diterima, yang berarti bahwa "Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (X4) berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)".

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) SKPD Kabupaten Bireuen, diperoleh nilai coefficient sebesar 0,199 dengan nilai statistik perbandingan  $t$  hitung  $< t$  tabel yaitu  $1,730 < 1,98$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,219 > 0,05$ . Sehingga hipotesis 1 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

bahwa kualitas laporan keuangan lebih dipengaruhi oleh sistem dan prosedur standar yang diterapkan dalam instansi pemerintah daripada kompetensi individu. Meskipun SDM yang memiliki pengetahuan dan keahlian mumpuni sangat penting, namun jika sistem pelaporan sudah tersentralisasi dan sangat terstruktur, maka peran individu dalam memengaruhi kualitas laporan menjadi terbatas. Dengan demikian, walaupun SDM memiliki keahlian dan sikap yang positif, hal tersebut mungkin tidak serta-merta meningkatkan kualitas laporan jika teknologi dan kebijakan yang ada sudah lebih dominan dalam menentukan hasil laporan. Selain itu, ketergantungan pada sistem otomatisasi dan kontrol internal yang ketat dapat membuat aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap SDM tidak secara langsung memengaruhi kualitas laporan keuangan. Misalnya, aspek "relevan" dan "dapat dibandingkan" lebih ditentukan oleh standar akuntansi yang berlaku dan penerapan kebijakan yang konsisten daripada kemampuan individu dalam mengolah data keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan pemerintahan, upaya peningkatan kualitas laporan keuangan mungkin lebih perlu difokuskan pada penguatan sistem pelaporan dan kontrol, bukan hanya pada pengembangan kapasitas SDM.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayani, 2023) yang menyatakan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial Penerapan Standar Akuntansi (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) SKPD Kabupaten Bireuen, diperoleh nilai coefficient sebesar 0,356 dengan nilai statistik perbandingan  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $3,651 > 1,98$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga hipotesis 2 diterima, hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik standar akuntansi diterapkan, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar akuntansi memberikan pedoman yang jelas dalam

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan, sehingga meningkatkan akurasi dan konsistensi laporan. Dengan penerapan yang tepat, laporan keuangan dapat memenuhi kriteria relevan, handal, dan dapat dibandingkan, sehingga pengguna laporan bisa lebih percaya pada informasi yang disajikan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Octaviani, 2020) yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya semakin optimal penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial Sistem Pengendalian Intern (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) SKPD Kabupaten Bireuen, diperoleh nilai coefficient sebesar 0,174 dengan nilai statistik perbandingan  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $2.714 > 1,98$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,008 < 0,05$ . Sehingga hipotesis 3 diterima, hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern diterapkan, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem pengendalian intern yang kuat membantu dalam mencegah kesalahan dan kecurangan, serta memastikan bahwa data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan akurat dan dapat diandalkan. Dengan adanya pengawasan dan pengendalian yang efektif, proses pelaporan keuangan menjadi lebih transparan dan konsisten, sehingga laporan keuangan dapat memenuhi kriteria relevan, handal, dan dapat dibandingkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sri Mulyati et al., 2019) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Menemukan bahwa keberadaan pengendalian intern yang kuat dapat mengurangi risiko kesalahan dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan kualitas informasi yang disajikan. Ini menunjukkan bahwa pengendalian intern berperan penting dalam menjamin laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

### **Pengaruh Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) SKPD Kabupaten Bireuen, diperoleh nilai coefficient sebesar 0,288 dengan nilai statistik perbandingan  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $2.2660 > 1,98$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,009 < 0,05$ . Sehingga hipotesis 4 diterima, hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (X4) berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kuat pengawasan keuangan yang diterapkan, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pengawasan yang baik membantu dalam memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan standar keuangan diterapkan secara konsisten, serta mencegah adanya penyelewengan dan kesalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Dengan adanya pengawasan yang efektif, laporan keuangan dapat menjadi lebih relevan, handal, dan dapat dibandingkan, sehingga mampu memberikan informasi yang lebih akurat dan transparan bagi para pemangku kepentingan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Dewi, 2022) yang menyatakan bahwa Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. bahwa pengendalian intern berperan penting dalam menjamin laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Artinya jika pengawasan di dalam suatu SKPD baik, terkontrol, dan tersistem maka kualitas laporan keuangan daerah akan baik pula.

### KESIMPULAN

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### Daftar Pustaka

- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Optimal*, 19(1), 19-39.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Iqbal, M., Sofwan, S. V., & Mariam, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(1), 1-15.
- Jatmiko, B., Irawan, D., Machmuddah, Z., & Laras, T. (2020). Factors affecting regional government financial statements: Evidence from Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(2), 89-100.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 22-32.
- Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1125-1134.

- Nilawati, N., & Haykal, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 6(2), 60-74.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
- Putri, H. P. A., AR, S., & Periansya. (2019). Pengaruh Kompetensi, SPI dan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 139-153.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3094-3104.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tawaqal, I., & Suparno, S. (2017). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 125-135.
- Yusriwanti, Y., & Susanti, N. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kab. Inhil). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 34-44.